

Komunikasi dan strukturasi gender petani di era revolusi industri 4.0

Anna Puji Lestari¹, Yuliyanto Budi Setiawan²

¹Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

²Universitas Semarang, Indonesia

ABSTRAK

Selama ini, struktur komunikasi antara buruh tani perempuan dan laki-laki masih bias. Hal ini mengakibatkan kesejahteraan buruh tani perempuan sangat jauh dibandingkan buruh tani laki-laki. Hal tersebut berakar dari struktur dominasi komunikasi laki-laki dalam pengelolaan dan penggarapan lahan Pertanian. Oleh karena itu, penelitian ini menghadirkan pengalaman pengelola lahan pertanian perempuan sebagai wujud pemberdayaan petani perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain fenomenologi. Fenomenologi digunakan untuk mengetahui pengalaman sadar seorang perempuan dalam mengelola lahan pertanian terkait struktur atau aturan yang dibuatnya bagi buruh perempuan petani yang bekerja di bawahnya. Teori yang digunakan adalah Strukturasi Gender dan Ekofeminisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur komunikasi asimetris merupakan penyebab utama perempuan pengelola lahan pertanian masih mengadopsi pola pikir patriarki. Informan dalam penelitian memiliki pekerja laki-laki dan perempuan. Namun, laki-laki diberi peran lebih banyak dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mendapatkan insentif lebih besar dari pekerja perempuan. Selain itu, status informan yang seorang perempuan dan tidak lagi memiliki suami ternyata membuatnya tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengelola lahan pertanian tanpa memberikan akses lebih kepada para petani laki-laki. Informan yang merupakan perempuan ternyata menganggap buruh tani perempuan lemah. Dengan demikian, struktur komunikasi asimetris memberikan kekuasaan lebih pada petani laki-laki dikarenakan bias bahasa yang menganggap perempuan lemah sehingga berimplikasi pada pembagian pekerjaan dan penciptaan teknologi pertanian yang hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki.

Kata-kata Kunci: Komunikasi; bias gender; perempuan; teknologi; pertanian

Communication and Farmer's gender structurization in industrial revolution 4.0 era

ABSTRACT

So far, the structure of communication between female and male farm workers is still biased, resulting in disparities between female farmworkers' welfare and male farmworkers. It is rooted in the structure of male communication dominance in the management and cultivation of agricultural land. Therefore, this study presents women's agricultural land managers' experiences to empower women farmers. The research design is qualitative research with a phenomenology. Phenomenology is used to determine the conscious experience in managing agricultural land related to the structure or rules for female farmworkers who work under female managers. The application of Gender Structuring and Ecofeminism theory shows that asymmetrical communication structure is the main reason women who manage agricultural land still adopt a patriarchal mindset. The informants in the study had male and female workers. However, men are given more roles in cultivating agricultural land to get more significant incentives than their female counterparts. Also, widowed woman informant status has created low confidence in managing agricultural land without giving male farmers more access. The female informants think those female farmworkers are weak. Thus, the asymmetrical communication structure gives more power to male farmers because of the language bias that considers women weak, which implies labor division and the creation of agricultural technology biased to men.

Keywords: *Communication; gender bias; women; technology; agriculture*

Korespondensi: Anna Puji Lestari. Universitas Islam Negeri Walisongo. Universitas Islam Negeri Walisongo
Email: annapujilestari@gmail.com

PENDAHULUAN

Saat ini kita memasuki era revolusi industri 4.0 yang dicirikan dengan peningkatan penggunaan Internet dan digitalisasi informasi. Pada era, kecepatan informasi demi mewujudkan kemajuan suatu bangsa mutlak diperlukan. Dengan demikian, demokrasi komunikasi dan kesetaraan dalam hal akses informasi, teknologi, dan struktur komunikasi yang terbentuk diharapkan juga mengalami keadilan. Namun, akses informasi, teknologi, serta struktur komunikasi pada saat ini masih mengalami bias: memberi kekuatan lebih pada pihak yang berkuasa, dan menekan pihak minoritas.

Salah satu bias komunikasi dapat dilihat pada struktur komunikasi di kalangan petani perempuan dan petani laki-laki. Para petani perempuan secara kebahasaan selalu dianggap “lemah” dan tidak dapat mengoperasikan teknologi yang memang diciptakan maskulin.

Para petani yang selama ini hanya dianggap sebagai pekerjaan ringan dan tidak membutuhkan keahlian khusus, dibandingkan dengan profesi lain, misalnya saja, dokter, guru, dosen, polisi, maupun tentara, sebenarnya memegang peranan penting. Para petani merupakan agen sektor yang merupakan sumber modal untuk investasi di sektor-sektor ekonomi lainnya, serta sebagai sumber penting bagi surplus perdagangan (devisa negara). Hal tersebut dapat dimaksimalkan, tentu saja dengan mewujudkan struktur komunikasi yang berkeadilan dan mengayomi semua kepentingan petani, baik petani laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat penduduk Indonesia paling banyak bekerja di sektor pertanian pada Februari 2017. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian sebanyak 39,68 juta orang atau 31,86 persen dari jumlah penduduk bekerja yang jumlahnya 124,54 juta orang.

Selaras dengan data tersebut, dalam laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang dikeluarkan pada tahun 2008, menunjukkan bahwa pertanian menjadi sumber utama kehidupan untuk perempuan di banyak negara berkembang dan menjadi jalan keluar utama untuk mengatasi kemiskinan di keluarganya.

Dengan demikian, peran perempuan dalam pertanian bisa menjadikan Indonesia lebih berdaya dan sejahtera. Artinya, pembangunan di

sektor pertanian diharapkan dapat memberikan manfaat yang adil bagi semua warga, baik laki-laki maupun perempuan. Namun, pembangunan di sektor pertanian selama ini belum memberikan manfaat yang adil bagi perempuan. Pasalnya, sebagian besar perempuan buruh tani diberikan upah lebih rendah daripada petani laki-laki karena terbatasnya pembagian kerja pertanian bagi perempuan. Hal ini disebabkan struktur komunikasi yang membudaya di kalangan petani yang lebih memihak petani laki-laki.

Hal tersebut terjadi karena adanya anggapan bahwa pekerjaan perempuan di sektor pertanian biasanya identik dengan ketelitian, tidak membutuhkan fisik yang berat dan rumit, berbeda dengan pekerjaan laki-laki yang membutuhkan fisik dan pikiran yang berat.

Insentif yang tidak memadai bagi buruh tani perempuan memicu menurunnya produktivitas di sektor pertanian. Padahal, insentif dari pekerjaan menggarap lahan pertanian yang dihasilkan para perempuan ini menjadi tumpuan hidup dan kehidupan banyak keluarga miskin (Berlianti, 2015).

Selain itu, masalah yang dihadapi kaum perempuan yang selama ini belum disentuh para peneliti komunikasi, yakni struktur komunikasi di sektor pertanian, antara lain ketidakseimbangan peran sebagai tenaga kerja dan akses terhadap informasi disebabkan bias teknologi dalam struktur komunikasi yang telah ada.

Bias teknologi yang dimaksud adalah kehadiran teknologi pengolahan lahan pertanian yang sarat akan maskulinitas. Dikarenakan teknologi-teknologi tersebut hanya memungkinkan laki-laki yang mengoperasikannya. Misalnya saja, *tractor*, *treser* (mesin perontok padi), *huller* (mesin penggiling), *transplanter* (mesin tanam), telah menggusur peran perempuan dari pekerjaan pengolahan lahan pertanian secara maksimal.

Teknologi-teknologi pertanian yang tidak ramah perempuan merupakan wujud bias yang mengerdikan peran petani perempuan dalam pengolahan dan pengelolaan lahan pertanian yang berakibat pada rendahnya kesejahteraan petani perempuan.

Studi-studi terdahulu mengenai marginalisasi perempuan di sektor pertanian pernah dilakukan oleh (Septiadi, 2013). Penelitian yang berjudul “*Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Strategi*

Bertahan Hidup Rumah Tangga Buruh Tani Miskin di Desa Cikarawang” menunjukkan Ketimpangan gender pada rumah tangga buruh tani karena adanya ketimpangan akses dan kontrol setiap anggota rumah tangga terhadap berbagai sumber daya nafkah (*livelihood assets*).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Farida Yuliani (2014) berjudul “*Ketidakadilan Gender dalam Pembangunan Pertanian: Studi Pandangan Politik Perempuan Anggota Legislatif di Kabupaten Kudus*” menunjukkan bahwa tidak ada kebijakan khusus untuk perempuan, tetapi arah kebijakan menuju kesetaraan gender agar perempuan mulai terlibat aktif dalam gabungan kelompok tani ada. Namun, jumlah perempuan yang dapat mengakses teknologi baru atau modal pertanian dari pemerintah dan perempuan yang mengelola pertanian, masih kurang dari laki-laki.

Selain itu, studi terdahulu yang dilakukan (Herawati, 2016) berjudul “*Pemaknaan Gender Perempuan Pekerja Media di Jawa Barat*” menunjukkan bahwa perempuan bekerja mendapatkan diskriminasi, dalam hal ini terjadi konflik antara peran gender pekerja wartawan perempuan di kantor.

Penelitian ini fokus pada persoalan bagaimana sesungguhnya pengambilan keputusan dalam komunikasi yang dilakukan perempuan pengelola lahan pertanian terhadap buruh tani perempuan yang bekerja untuknya (struktur komunikasi gender). Asumsinya, perempuan akan memberikan komunikasi yang memadai bagi buruh perempuan maupun buruh laki-laki. Misalnya saja dengan cara memberikan kebijakan pengelolaan lahan pertanian yang adil terhadap sesama perempuan, dalam hal insentif, pembagian pekerjaan penggarapan lahan, dan pengoperasian teknologi pertanian dalam struktur komunikasi yang berkeadilan.

Dengan demikian, permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisa struktur komunikasi gender dalam praktik pertanian. Penelitian komunikasi mengenai struktur komunikasi di sektor pertanian belum pernah dilakukan sehingga merupakan kebaruan penelitian. Adapun yang dimaksud struktur merujuk pada terminologi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, yakni perangkat sumber daya-aturan yang terlibat dalam artikulasi institusi sosial. Institusi sosial yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sistem

pengelolaan pertanian menyangkut aspek struktur komunikasi.

Struktur yang dimaksudkan juga membahas mengenai akses teknologi pertanian sebagai sumber daya oleh petani perempuan. Selain itu, apabila dalam penelitian terdahulu perempuan yang mengelola pertanian masih jarang dilibatkan, sebaliknya, penelitian ini justru menghadirkan informan seorang perempuan pengelola lahan pertanian. Hal tersebut dimaksudkan untuk menganalisa mengenai peranan perempuan dalam pengambilan kebijakan pada strukturasi komunikasi gender di sektor pertanian.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori strukturasi gender dan ekofeminisme. Teori strukturasi berasal dari Anthony Giddens, selanjutnya dikembangkan oleh Sunarto menjadi teori Strukturasi Gender (Sunarto, 2009).

Teori strukturasi gender mempunyai dua konsep pokok terkait dengan struktur yang digenderkan (*engendered structure*) dan reproduksi ganda. Struktur yang digenderkan artinya terjadi dominasi gender dalam struktur manakala struktur signifikansi dan legitimasi memberikan justifikasi terhadap kekuasaan kaum laki-laki atas kaum perempuan melalui mekanisme kursif dan persuasif. Mekanisme kursif terkait dengan kekerasan simbolik (ideologis) apabila menggunakan istilah Bourdieu. Kekerasan simbolik merupakan intimidasi yang dilakukan oleh bahasa (Bourdieu, 2010).

Reproduksi ganda artinya, dalam strukturasi terjadi produksi dan reproduksi sistem sosial melalui penggunaan aturan dan sumber daya aktor dalam interaksi. Dalam struktur komunikasi keluarga misalnya, juga terjadi kesenjangan akses informasi antara perempuan dan laki-laki (Lestari, 2018).

Selain itu, guna menganalisis masalah ketimpangan gender, digunakan ekofeminisme sebagai teori. Selama ini, perempuan selalu dikaitkan dengan alam yang layak digarap. Misalnya saja, sering didengar istilah menggarap sawah istri untuk menggambarkan aksi seorang suami berbubungan badan dengan istrinya. Sebagai perempuan, menurut pandangan patriarki, keberadaannya layak digarap, bukan menggarap. Sebenarnya hal tersebut merupakan mitos penyebab perempuan termarginalisasi dalam struktur komunikasi pengelolaan

lahan pertanian. Adapun pengertian mitos menurut Barthes bertalian dengan sejarah dan bentuk masyarakat pada masanya. Barthes memandangnya sebagai bentuk pesan atau tuturan (menyesatkan) yang banyak diyakini kebenarannya walau tidak dapat dibuktikan (Barthes, 1972).

Ekofeminisme memiliki beberapa asumsi yakni: pola pikir berdasarkan nilai hirarki, yaitu pola pikir “atas-bawah” yang memberikan nilai, status, atau prestise yang lebih tinggi kepada apa yang ada “di atas” (laki-laki); dualisme nilai yakni memberikan status yang lebih tinggi pada laki-laki terhadap perempuan; logika dominasi yaitu struktur argumentasi yang menuju kepada membenaran subordinasi (Warren, 1972).

Menurut Karen J. Warren, salah satu tokoh Ekofeminisme, modus berfikir patriarki yang hirarki, dualistik, dan opresif telah merusak perempuan dan alam, hal tersebut karena perempuan telah “dinaturalisasi” (natural = alam) dan alam telah “difeminisasi” (Tong, 2008).

Contoh konkret perempuan dinaturalisasi adalah sebutan “babon” yang berarti induk ayam untuk menyebut seorang istri, sebutan ini populer di Jawa Tengah. Sedangkan alam difeminisasi terlihat dari istilah yang digunakan untuk menggambarkan alam yang “ditakhlukkan”, “digarap”, “dikuasai”, “ditambang” oleh laki-laki.

Dalam strukturasi gender, menurut Sunarto, pengetahuan dan kekuasaan ini dikuasai oleh agen laki-laki. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari relasi asimetris sebagaimana dinaturalisasikan oleh patriarkisme. Konsekuensi penguasaan itu menjadikan hasil interaksi lebih banyak berupa reproduksi sistem sosial yang represif terhadap kepentingan agen perempuan. Ketika kepemilikan pengetahuan dan kekuasaan dalam diri agen perempuan sudah memadai, maka ia bisa melakukan produksi sistem sosial sesuai dengan kepentingannya.

Menurut Sunarto, secara teoritis, ketika wacana feminisme sekarang ini sudah menjadi kesadaran diskursif dalam sistem sosial kita, seharusnya para agen perempuan itu juga memiliki kesadaran diskursif ataupun praktis terhadap nilai-nilai feminis (Sunarto, 2009). Dengan motivasi kesadaran tersebut, agen perempuan itu bisa melakukan pengawasan refleksif terhadap semua tindakannya maupun tindakan yang dilakukan agen laki-laki yang

selaras dengan nilai feminisme tersebut. Melalui motivasi kesadaran tersebut, agen perempuan bisa mengevaluasi proses rasionalisasi tindakan yang sedang berlangsung.

Melalui tindakan tersebut, agen dengan jenis kelamin berbeda itu melakukan produksi dan reproduksi sistem-sistem sosial melalui penggunaan aturan-aturan (semantik, moral, seks) dan sumber daya-sumber daya (alokatif dan otoritatif) yang dimiliki sebagai bagian dari properti sosial mereka. Sistem sosial dominan yang dijadikan basis tindakan para agen ini merupakan perwujudan dari ideologi para agen dominan melalui optimalisasi modalitas mereka dalam struktur signifikansi, dominasi, legitimasi, dan gender melalui interaksi komunikasi, kekuasaan, sanksi, dan kekerasan. Ideologi dipahami sebagai modus wacana atau struktur pemaknaan yang dimobilisasi untuk memberi legitimasi pada kepentingan-kepentingan kelompok dominan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan paradigma kritis dengan desain fenomenologi kritis. Menurut Bourdieu, fenomenologi bisa menjadi kritis apabila secara politis sadar akan efek politik suatu peristiwa (Bourdieu, 1991). Asumsi yang mendasari digunakannya paradigma kritis adalah bahwa ketidakadilan gender merupakan hal yang diperjuangkan paradigma ini. Tradisi kritis mempertanyakan relasi kekuasaan yang timpang sehingga mengakibatkan dominasi dalam proses komunikasi (Severin, 2005). Dalam hal ini adalah komunikasi gender melalui bahasa antara laki-laki dan perempuan yang sarat akan kepentingan dan diskriminasi.

Fenomenologi kritis pernah digunakan dalam penelitian komunikasi oleh Lestari berjudul “*Digital Gender Gap Pattern in Indonesia*” yang meneliti mengenai pengalaman perempuan generasi *baby boom* yang terkucilkan dari akses teknologi komunikasi sehingga berdampak pada minimnya pengetahuan yang berimbas pada kurangnya kesejahteraan hidup perempuan *baby boom*. Hal ini dikarenakan perempuan *baby boom* tidak dapat mengakses informasi secara maksimal terkait kesehatan, hukum, ekonomi, dan pendidikan (Lestari, 2018b).

Fenomenologi berkeyakinan bahwa setiap pengetahuan tentang diri kita dan dunia haruslah di mulai dengan pengalaman manusia yang paling personal. Terkait dalam penelitian ini, fenomenologi digunakan untuk mengetahui pengalaman sadar seorang perempuan dalam mengelola lahan pertanian terkait struktur atau aturan yang dibuatnya bagi buruh perempuan petani yang bekerja di bawahnya. Hal ini sebagaimana diungkapkan (Creswel, 2009) sebagai berikut:

“Phenomenological research is a strategy of inquiry in which the researcher identifies the essence of human experiences about a phenomenon as described by participants. Understanding the lived experiences marks phenomenology as a philosophy as well as method, and the procedure involves studying a small number of subjects through extensive and prolonged engagement to develop patterns and relationships of meaning. In this process, the researcher brackets or sets aside his or her own experiences in order to understand those of the participants in the study”

Data primer penelitian ini diperoleh dari narasumber kunci yaitu perempuan pengelola lahan pertanian di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Subyek penelitian ditentukan secara purposif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam pada Januari 2019. Data sekunder diperoleh melalui wawancara tidak terstruktur, hasil penelitian terdahulu, dokumentasi dan sumber-sumber lain yang relevan.

Analisis data menggunakan prosedur analisis fenomenologi transendental yang meliputi kegiatan proses *epoche*, reduksi fenomenologi transendental, variasi imajinasi, dan sintesis makna dan esensi melalui analisis gabungan deskripsi tekstural dan gabungan deskripsi struktural (Moustakas, 1994).

Tahap *pertama* adalah proses epoh. Yaitu meniadakan pemikiran bias mengenai segala sesuatu. Artinya, kita mencegah munculnya segala hal mengenai referensi yang kita miliki sebelumnya dan menerima pengalaman baru. Tahap *kedua*, reduksi fenomenologi adalah mendeskripsikan bahasa-bahasa tekstual seseorang (narasumber), tidak hanya sebagai objek eksternal, tetapi juga kesadaran perilaku internal (peneliti). Tahap *ketiga*, variasi imajinasi, adalah mencari kemungkinan

makna melalui imajinasi dalam kerangka referensi, meletakkan sikap yang berlawanan dan merupakan pembalikan, dan mendekati fenomena dari perspektif berbeda. Tahap *keempat*, merupakan proses yang terakhir adalah sintesis makna dan esensi melalui analisis gabungan deskripsi tekstural dan gabungan deskripsi struktural. Langkah ini memandu menegakkan esensi pengetahuan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Informan adalah seorang perempuan (55 tahun) pengelola lahan pertanian yang disewanya dari pemilik lahan dengan harga Rp10 juta untuk dua tahun dengan luas area persawahan setengah bahu. Bahu merupakan satuan luas lahan yang biasa dipakai di Jawa. Satu bahu adalah 500 ubin. Satu ubin setara dengan 14,0625 meter persegi.

Sebelumnya informan memiliki pengalaman bertani sejak tahun 1986, sejak usianya 22 tahun, sewaktu membantu mertuanya mengelola sawah. Namun, sejak 20 tahun lalu dia telah bercerai dan tidak memiliki lahan pertanian sehingga informan menyewa lahan pertanian milik orang lain di Weleri, Kendal, Jawa Tengah untuk dikelola. Berikut ini dipaparkan hasil penelitian berdasarkan kategori-kategori dalam strukturasi komunikasi gender:

Kesenjangan upah dan akses teknologi yang minim bagi petani perempuan juga diperantarai oleh bahasa yang bias gender dalam pola komunikasi di antara petani.

Dari Max Weber, Bourdieu memperoleh kesadaran tentang pentingnya dominasi dan sistem simbolik dalam kehidupan sosial, serta gagasan tatanan sosial yang bertransformasi menjadi teori arena (*fields*). Bourdieu kemudian mengembangkannya menjadi tindakan bermakna, yaitu tindakan terkait reaksi atau perilaku orang lain. Oleh karena itu, menurut Bourdieu, penjelasan sosial harus selalu memperhitungkan dimensi simbolis yang berkaitan dengan legitimasi kekuasaan (tradisional, karismatik, legal-rasional) (Haryatmoko, 2011).

Menurut Bourdieu, bahasa tidak pernah bebas nilai. Ketika seseorang mengatakan sesuatu hal, orang yang menerima akan menangkap maksud yang berbeda. Setiap kata dan setiap ekspresi memiliki ancaman

'*antagonis*' yang dicerminkan oleh cara yang hanya dipahami si pengirim dan penerima pesan. Dalam setiap percakapan ada pihak yang mendominasi dan didominasi (Bourdieu, 1991).

Dalam kaitannya dengan patriarki, merupakan sistem yang mendominasi (menunjukkan kuasa simbolik) atau melegitimasi kekuasaannya kepada perempuan. Dalam proses tersebut, legitimasi bahasa resmi, sistem pendidikan memiliki peran penting. Sebab, bahasa dipopulerkan lewat sekolah. Dominasi bahasa di sekolah akan dibawa ke rumah dan menjadi pembiasaan (*habitus*). Orang cenderung tidak menyadari intimidasi atau kekerasan simbolik (*symbolic violence*) lewat dominasi bahasa.

Bahasa menjadi bagian dari sistem simbolik selain seni, agama, dan mitos. Bahasa menjadi instrumen mempertahankan dominasi atau instrumen untuk mendapatkan kekuasaan (*power*). Bahasa adalah kekuasaan simbolik. Pertukaran bahasa selalu berhubungan dengan kekuasaan simbolik (Bourdieu, 1991).

Banyak orang tidak sadar akan adanya intimidasi, kekerasan simbolik lewat dominasi bahasa. Ucapan tidak hanya disampaikan untuk dipahami tetapi juga sebagai tanda kekayaan yang harus dievaluasi dan diapresiasi dan juga sebagai tanda otoritas yang harus diyakini dan dipatuhi. Mereka yang menguasai kapital yang lebih besar (laki-laki) akan menjadi kelas yang dominan.

Bourdieu melihat sistem simbolik (melalui bahasa) sebagai instrumen dominasi. Tradisi fungsionalisme ini menjelaskan produksi simbol dengan mengaitkannya dengan kepentingan kelas dominan, ideologi kelompok tertentu yang di-*share* ke masyarakat luas. Kultur dominan membentuk integrasi diantara kelompok atau kelas dominan. Budaya dominan juga berperan dalam membentuk integrasi masyarakat yang semu, kesadaran palsu, legitimasi kepada aturan yang sudah mapan, menciptakan perbedaan hierarkhis dan melegitimasi perbedaan ini.

Kekerasan simbolik pada dasarnya adalah pemaknaan kategori-kategori pemikiran dan persepsi terhadap agen-agen sosial terdominasi, yang kemudian menganggap tatanan sosial itu sebagai sesuatu yang "adil." Ini adalah penggabungan struktur tak sadar, yang cenderung mengulang struktur-struktur tindakan dari pihak yang dominan. Pihak yang terdominasi kemudian memandang posisi

pihak yang dominan ini sebagai yang "benar." Kekerasan simbolik dalam arti tertentu jauh lebih kuat daripada kekerasan fisik karena kekerasan simbolik itu melekat dalam setiap bentuk tindakan dan struktur kognisi individual, dan memaksakan legitimasi pada tatanan sosial.

Kuasa simbolik Bourdieu hadir dalam arena dari relasi dialektiknya dengan habitus dan modal (kapital), terutama kapital simbolik. Seseorang yang menguasai kapital dengan habitus yang memadai akan menguasai arena dan memenangkan pertarungan sosial karena di dalam arena selalu terjadi pertarungan sosial.

Pertarungan sosial di antara petani berjenis kelamin perempuan dan laki-laki terjadi dikarenakan kapital dikuasai oleh petani laki-laki dalam hal penguasaan teknologi yang berimbas pada minimnya peran petani perempuan, hal ini dilestarikan melalui peran bahasa (dalam komunikasi) yang bias gender. Peran bahasa yang bias gender misalnya saja, pernyataan bahwa tenaga buruh tani perempuan lemah, buruh tani perempuan tidak bisa mengoperasikan teknologi pertanian karena tidak mampu, peran buruh tani perempuan terbatas sehingga lumrah memiliki gaji sedikit. Padahal, apabila ditelaah semua diskriminasi tersebut terjadi dikarenakan struktur sosial dalam sektor pertanian yang memang memberi akses lebih bagi petani laki-laki dalam hal pengoperasian teknologi pertanian yang sengaja diciptakan "maskulin", megakibatkan sistem pembagian kerja yang diskriminatif antara petani perempuan dan petani laki-laki.

Sebagai pengelola lahan pertanian, informan memiliki pekerja laki-laki dan perempuan. Namun, laki-laki memiliki peran lebih banyak dalam hal mengutarakan pendapat serta pengolahan lahan pertanian sehingga diberi insentif lebih besar dari pekerja perempuan. Sebagaimana pernyataan informan:

"Yo saya ada tenaga buruh, kuli panggul disuruh saya yang punya sawah. Semua buruh lanang wedok (laki dan perempuan). Kalau perempuan bayaran luwih sithik (sedikit). Nek laki-laki kan ngusungi sampai jalan raya. Nek wong wedok kan hanya memetik, kalau orang laki-laki kan angkat-angkat, manggul, jadi pekerjaan banyak dilakukan laki-laki."

Informan juga menyatakan bahwa pekerja laki-laki bisa bekerja dengan cepat pada saat

menabur pupuk karena memiliki langkah kaki yang lebih panjang dari perempuan. Selain itu, laki-laki diberikan peranan lebih dalam hal penggarapan lahan pertanian. Oleh karena itu, informan memberikan upah Rp50 ribu untuk pekerja perempuan dan Rp60-75 ribu untuk pekerja laki-laki.

“Saya kalau menggaji perempuan sakniki nek tandur pari bebas (nggak ngasih makan minum) itu Rp50 ribu, kalau laki-laki ada itu cabut benih juga ya jadi Rp75 ribu, perempuan gak cabut benih tapi cuma tandur tok.”

Status informan yang seorang perempuan dan janda menjadikannya merasa tidak dapat mengelola lahan pertanian yang disewanya seorang diri. Oleh karena itu, informan meminta bantuan tatangga di Weleri (laki-laki) untuk menggarap sawahnya dengan sistem bagi hasil paro atau 50-50. Informan menerima hasil panen setahun tiga kali. Dalam setahun lahannya ditanami jagung satu kali dan padi dua kali. Informan dulunya menanam tembakau, tetapi semenjak tembakau harganya murah, informan enggan menanamnya lagi.

Menurut informan, sistem bagi hasil 50-50 juga memberatkan dirinya karena dia harus membayar biaya sewa lahan pertanian dan seluruh biaya pupuk dan obat-obatan. Namun, informan tidak bisa memiliki posisi tawar lebih karena dirinya perempuan.

“Saya bayar sewa tanah pertanian, dan bayar pupuk, obat hama, bayar buruh tani, dan lainnya, ya udah mau gimana lagi yang penting saya kan gak capek. Saya menerima hasil per panen, setahun tiga kali. Saya tinggal terima uang sepanenan, yang jual hasil panen ya sono (tetangga yang dikasih kepercayaan). Teradang ya biaya sewa Rp10 juta hasil yang saya terima resik ngepas 10 juta, kadang ya lebih sedikit, paling Rp500 rupiah, kadang Rp200 rupiah. Soalnya obat-obatan mahal,” kata informan.

Informan mempercayakan perontokan padi dengan mesin oleh para buruh perontok padi yang dioperasikan sepenuhnya oleh tenaga laki-laki.

“Kalau panen sekarang kan pakai mesin, semua laki-laki, gak ada perempuannya. Yang megang mesin laki-laki sepuluh

orang. Upahnya sistem 10 siji. Jadi setiap beras sepuluh kilo beras yang dirontokkan mereka dapat upah 1 kg padi, upahnya tidak dalam bentuk uang.”

Selain itu untuk selep atau giling padi informan menyerahkan ke parbik rice mile dengan biaya Rp10 ribu setiap 10 kg giling.

“Kalau nyelep di pabrik rice mile, 10 kilo bayar 10 ribu. Praktis. Jadi tenaga perempuan cuma buat tandur.”

Informan menyatakan dengan keberadaan mesin untuk mengolah padi, memudahkan dan praktis. Namun, sebagai perempuan, informan tidak memiliki akses untuk memiliki mesin perontok padi, rice mile, bahkan popmpa air untuk irigasi sawah.

“Musim kemarau ini ada alat sedot air, mesin dipinjam dari desa jadi ridak perlu bayar biaya sewa. Kalau butub air ya lapor sama yang jaga (para penjaga mayoritas laki-laki). Kalau musim kemarau butuh air tiga hari sekali. Biaya solar untuk mengoperasikan mesin sedot air habis Rp200 ribu, kalau musim kemarau seminggu habis Rp400 ribu buat mengairi sawah.”

Informan menyatakan kendala utama yang dialami petani adalah mahalnya obat pembasmi hama. Informan pernah memberikan masukan kepada tim penyuluhan pertanian yang datang ke desanya agar diberikan keringanan obat-obatan. Namun, keringanan hanya diberikan sesekali saja. Sebagaimana pernyataan informan berikut ini:

“Selama tiga bulan kadang semprot tiga kali trus dipupuk minimal 2 kali... pupuk satu sak Rp100 ribu... tidak dikasih keringanan harga. Saya pernah memberi masukan keringanan pupuk tetapi diberi sebentar, tidak terus (tahun 2018). Tahun ini (2019) gak ada keringanan... pupuk habis dua sak... dua kali tabur... dalam setiap masa panen biaya habis Rp400-500 ribuan. Dapat bantuan paling obat semprot satu, yang lainnya beli sendiri, mahal-mahal.”

Dikarenakan minimnya keluhan petani yang mendapatkan solusi, informan menyatakan bahwa dirinya dan para buruh tani tidak bersemangat menghadiri penyuluhan

yang diberikan ke desanya. Petugas penyuluhan datang setiap dua atau tiga bulan sekali untuk memberikan pengarahan mengenai jenis padi yang sebaiknya ditanam pada musim tertentu.

“Penyuluhan sekedarnya saja, kita ini kan orang-orang udah pada pengalaman. Selama penyuluhan nggak dikasih bahan semprot gratis atau keringanan harga pupuk dan obat. Sekarang masih keringanan cuma untuk harga obat, harga Rp100 ribu jadi Rp80 ribu, itupun masih mahal bagi petani,” keluh informan.

Informan menjelaskan, harga obat hama, pupuk, dan biaya pengairan yang mahal adalah hal yang dirasakan semua petani. Selain itu, petani sangat menderita karena biaya yang dikeluarkan untuk penanaman, penggarapan, dan pengolahan padi tidak sebanding dengan biaya yang diterima saat panen, padahal hasil padi yang dihasilkan bagus. Pasalnya, saat musim panen datang justru harga padi anjlok, dan dibeli murah oleh tengkulak.

“Menjual ke tengkulak harga murah. Kalau pas panen petani itu kan biaya besar, orang kuli juga mahal, kalau jual pas panen murah. Harusnya untuk padi C4 hasil sawah sebauh bisa jual dengan harga Rp18 juta ini hanya bisa jual Rp10 juta.”

Mengenai rendahnya harga jual beras, informan menyatakan apabila para petani tidak bisa protes karena bulog atau KUD tidak bisa menyerap banyak hasil tani dari petani sehingga informan mau tidak mau menjual hasil pertanian ke tengkulak. Informan pernah menyatakan penderitaan ini kepada petugas penyuluhan pertanian tetapi tidak ada solusi.

“Petani gak bisa protes. Protes ke petugas penyuluhan ya mereka menyalahkan tengkulak. Saya menjual ke tengkulak, ke juragan-juragan padi. Saya gak jual di KUD atau bulog soalnya gak menerima dari kita.”

Informan menyatakan dalam setiap tahun, dua kali panen padi semua harganya anjlok, harga jagung yang ditanamnya juga anjlok. Harga jagung di lahan sebauh yang seharusnya bisa dijual dengan harga Rp600 ribu anjlok menjadi Rp500 ribu.

Informan menyatakan selama ini tim penyuluhan yang terdiri dari Lurah, Camat,

dan Carik, serta dua orang petugas penyuluh pertanian hanya bisa-bisa memberikan penyuluhan, tetapi tidak bisa membantu petani yang merugi karena harga padi anjlok.

“Mereka yang ngasih penyuluhan ada Pak Lurah, Pak Camat, Pak Carik, dan dari pertanian ada dua. Dua bulan sekali ngasih penyuluhan. Mereka Cuma bisa ngomong tok gak pada mbantu petani jadi petani pada malas datang ke acara penyuluhan.”

Dari reduksi data-data yang diperoleh di lapangan, diperoleh interpretasi data bahwa perempuan pengelola lahan pertanian mereproduksi kultur patriarki dalam struktur komunikasi. Hal ini terjadi dikarenakan akses komunikasi dan akses teknologi masih dikuasai petani laki-laki, selain itu, pembagian kerja dan insentif yang minim bagi petani perempuan, dibandingkan petani laki-laki.

Ini artinya, di dalam struktur komunikasi, perempuan pengelola lahan pertanian melakukan reproduksi atas dominasi dan legitimasi laki-laki yang dianggap memiliki kecakapan lebih menggarap sawah dari perempuan, dikarenakan fisik perempuan yang dinilai lemah.

Selain itu, modalitas atau penguasaan teknologi pertanian hanya bisa diakses oleh laki-laki. Pasalnya, semua mesin pertanian, bentuknya atau modelnya diperuntukkan untuk dioperasikan hanya oleh laki-laki. Dengan demikian, modalitas atau sumber daya-sumber daya penguasaan teknologi masih sangat bias gender. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab pengelola lahan pertanian perempuan tidak memiliki akses untuk kepemilikan alat pertanian.

Struktur dominasi patriarki dalam penggarapan lahan pertanian dan modalitas alat pertanian yang bias gender menyebabkan interaksi komunikasi dalam proses kekuasaan yang dijalankan oleh perempuan pengelola lahan pertanian mengalami batasan. Hal ini terbukti bahwa informan yang bestatus janda, terpaksa membutuhkan bantuan laki-laki untuk mengelola sawahnya walau hal tersebut menjadikannya tidak dapat memperoleh keuntungan maksimal dari sawah yang dikelolanya.

Dengan mengacu pada pendekatan Ekofeminisme melebur dalam teori strukturasi, bagan tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut: pengelola lahan pertanian perempuan melakukan produksi dan reproduksi relasi

gender asimetris melalui penggunaan aturan semantika dan norma seksualitas (pengetahuan bahwa laki-laki lebih kuat dari perempuan), serta sumber daya alokatif dan otoritatif (kekuasaan) yang dimiliki laki-laki dalam penguasaan teknologi membuat perempuan tidak memiliki posisi tawar dalam perolehan insentif penggarapan lahan pertanian. Dominasi gender tersebut selanjutnya menaturalisasikan kekerasan bahwa sudah selayaknya buruh perempuan menerima upah lebih rendah dari buruh laki-laki dikarenakan “penakhtuk” alam adalah alaki-laki karena menguasai teknologi pertanian yang maskulin.

Dengan kata lain, perempuan pengelola lahan pertanian melakukan reproduksi dominasi maskulin dalam struktur pengelolaan dan penggarapan lahan pertanian dikarenakan teknologi yang maskulin dan anggapan dari pola pikir patriarki yang menancap kuat bahwa perempuan lebih lemah dari laki-laki.

Dari perspektif ekofeminisme, kepasrahan petani perempuan menerima insentif yang lebih rendah dari laki-laki dikarenakan naturalisasi mitos bahwa perempuan lemah, perempuan identik dengan alam dan selayaknya ditakhlukkan oleh laki-laki, sang penggarap sawah.

Permasalahan struktur patriarki dalam pengelolaan dan penggarapan area pertanian secara eksplisit terlihat dari mitos bahwa perempuan lemah dan diperkuat oleh skema penguasaan teknologi pertanian yang semuanya hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Sebagaimana pernyataan Arnold Pacey bahwa teknologi tidak bersifat netral karena berperan dalam pembentukan simbol status (Pacey, 2000).

Teknologimaskulininise makin menguatkan tatanan sosial sistem patriarki. Terkait dengan hal ini, Pierre Bourdieu menyatakan bahwa tatanan sosial berfungsi seperti sebuah mesin yang meratifikasi dominasi maskulin berupa pembagian kerja secara seksual, yaitu tentang tempat kerja, jam kerja, dan alat-alat kerja secara seksis (Bourdieu, 2010).

Tatanan sosial atau struktur komunikasi bias gender dalam pengelolaan lahan pertanian dikarenakan pembagian kerja secara seksual yang hanya mengijinkan buruh tani perempuan menanam padi, jam kerja buruh tani menjadi sedikit karena penguasaan alat-alat kerja pertanian dalam bentuk mesin hanya bisa

dilakukan laki-laki.

Selain itu, solusi konkrit yang dapat ditawarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah menciptakan struktur komunikasi simetris antara petani laki-laki dan perempuan dengan meniadakan anggapan bahwa petani perempuan lemah dan petani laki-laki kuat. Selain itu, perlu penciptaan teknologi ramah perempuan, yakni teknologi pertanian yang bisa dioperasikan oleh para perempuan. Dengan penciptaan teknologi pertanian sensitif gender dimungkinkan upah dan kesempatan kerja yang sama bagi buruh perempuan dengan buruh laki-laki. Hal ini, tentu saja, akan meningkatkan kesejahteraan buruh perempuan.

Berikutnya, diperlukan agen-agen penyuluhan sensitif gender yang secara konkret melibatkan buruh tani perempuan dalam komunikasi dan mempercepat adopsi teknologi sehingga peran buruh tani perempuan bisa meningkat.

Kaitannya dengan sistem penjualan beras melalui tengkulak yang merugikan petani, diharapkan pemerintah lebih banyak memberikan akses bagi Parum Bulog untuk menyerap gabah para petani secara maksimal. Apabila hal ini dilakukan, akan memangkas rantai panjang distribusi beras sehingga beras dapat dijual kepada konsumen dengan lebih murah.

Pada saat produksi padi belum maksimal karena keterbatasan dana petani dalam menggarap sawah mengakibatkan panen sedikit dan harga gabah naik. Hal ini juga mengakibatkan Perum Bulog tidak dapat menyerap gabah milik petani. Pasalnya, harga pembelian pemerintah (HPP) tergolong rendah.

Sebagaimana diketahui, regulasi pembelian beras oleh Perum Bulog sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Bulog hanya bisa menyerap gabah dengan harga pembelian pemerintah (HPP) Rp3.700 per kilogram (kg) dengan maksimal fleksibilitas 10% yakni Rp4.070 per kg.

Harga tersebut sebenarnya masih belum cukup mengingat kerja petani mengelola dan menggarap sawah pertanian tidak mudah. Apalagi Hingga akhir tahun ini, Perum Bulog (Persero) ditugaskan dapat mengamankan stok cadangan beras pemerintah (CBP) setidaknya di level 1 juta—1,5 juta, sehingga harga HPP perlu dinaikkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

SIMPULAN

Perempuan yang memiliki posisi sebagai pengelola dan memiliki lahan pertanian, nyatanya juga mendiskriminasi sesama petani perempuan. Informan dalam penelitian memiliki pekerja laki-laki dan perempuan. Namun, laki-laki diberi peran lebih banyak dalam pengolahan lahan pertanian sehingga mendapatkan insentif lebih besar dari pekerja perempuan. Selain itu, status informan yang seorang perempuan dan tidak lagi memiliki suami ternyata membuatnya tidak memiliki kepercayaan diri dalam mengelola lahan pertanian tanpa memberikan akses lebih kepada para petani laki-laki.

Semua diskriminasi tersebut terjadi dikarenakan akses teknologi pertanian yang bias gender. Semua teknologi pertanian seperti tractor, treser (mesin perontok padi), huller (mesin penggiling), transplanter (mesin tanam), sengaja diciptakan agar hanya laki-laki saja yang bisa mengoperasikannya, sementara perempuan tidak. Selain itu, informan menjelaskan, harga obat hama, pupuk, dan biaya pengairan yang mahal adalah hal yang dirasakan semua petani. Ditambah lagi, para petani sangat menderita karena biaya yang dikeluarkan untuk penanaman, penggarapan, dan pengolahan padi tidak sebanding dengan biaya yang diterima saat panen, padahal hasil padi yang dihasilkan bagus. Pasalnya, saat musim panen datang justru harga padi anjlok, dan dibeli murah oleh tengkulak.

Mengenai rendahnya harga jual beras, informan menyatakan apabila para petani tidak bisa protes dikarenakan bulog atau KUD tidak bisa menyerap banyak hasil dari petani sehingga informan mau tidak mau menjual hasil pertanian ke tengkulak. Informan pernah menyatakan penderitaan ini kepada petugas penyuluhan pertanian tetapi tidak ada solusi.

Dari reduksi data-data yang diperoleh di lapangan, diperoleh interpretasi data bahwa perempuan pengelola lahan pertanian mereproduksi kultur patriarki dikarenakan pembagian kerja dan insentif yang minim bagi pekerja perempuan dibandingkan pekerja laki-laki. Ini artinya, di dalam struktur penggarapan lahan pertanian, perempuan pengelola lahan pertanian melakukan reproduksi atas dominasi dan legitimasi laki-laki yang dianggap memiliki

kecakapan lebih menggarap sawah dari perempuan, dikarenakan fisik perempuan yang dinilai lemah.

Selain itu, modalitas atau penguasaan teknologi pertanian hanya bisa diakses oleh laki-laki. Pasalnya, semua mesin pertanian, bentuknya atau modelnya diperuntukkan untuk dioperasikan hanya oleh laki-laki. Dengan demikian, modalitas atau sumber daya-sumber daya penguasaan teknologi masih sangat bias gender. Hal inilah yang menjadi salah satu sebab pengelola lahan pertanian perempuan tidak memiliki akses untuk kepemilikan alat pertanian. Kaitannya dengan sistem penjualan beras melalui tengkulak yang merugikan petani, diharapkan pemerintah lebih banyak memberikan akses bagi Parum Bulog untuk menyerap gabah para petani secara maksimal. Apabila hal ini dilakukan, akan memangkas rantai panjang distribusi beras sehingga beras dapat dijual kepada konsumen dengan lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Barthes, R. (1972). *Mythologies* (Selected and Translated from the French by Annette Lavers).
- Berlianti. (2015). Kontribusi petani perempuan terhadap sosial ekonomi keluarga. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 14(1).
- Bourdieu, P. (1991). *Language and symbolic power*. Cambridge UK: Polity Press.
- Bourdieu, P. (1991). *The political ontology of martin heidegger*. Stanford: Stanford University Press.
- Bourdieu, P. (2010). *Dominasi maskulin*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Creswell, J. W. (2009). *Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Haryatmoko. (2011). *Habitus dan kapital dalam strategi kekuasaan*.
- Herawati, M. (2016). Pemaknaan gender perempuan pekerja media di Jawa Barat. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 84–94.
- Lestari, A. P. dan Sunarto. (2018a). Digital gender gap for housewife. *Jurnal The Messenger*, 10(1).
- Lestari, A. P. dan Sunarto. (2018b). *Digital*

- gender gap pattern in Indonesia* (ICENIS).
- Moustakas, C. (1994). *Phenomenological research methods*. New York: SAGE Publications.
- Pacey, A. (2000). *The culture of technology*. Cambridge, MA: The MIT Press.
- Septiadi, M. dan Winati Wigna. (2013). Pengaruh ketimpangan gender terhadap strategi bertahan hidup rumah tangga buruh tani miskin di Desa Cikarawang. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 01(2).
- Severin, J. W. dan James Tankard. (2005). *Teori komunikasi: sejarah, metode, dan terapan di dalam media mass*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sunarto. (2009). *Televisi, kekerasan, dan perempuan*. Kompas.
- Tong, R. P. (2008). *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Warren, Karen J. (1972). *The constitution of society: teori strukturasi untuk analisis sosial*. Pedati.
- Yuliani, F. (2014). Ketidakadilan gender dalam pembangunan pertanian: studi pandangan politik perempuan anggota legislatif di Kabupaten Kudus. *Palastren*, 7(2).